

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Efendi et al (2021) pemberdayaan merupakan kemampuan dan upaya yang berlandaskan akal budi untuk meningkatkan kapasitas komunitas atau kelompok masyarakat agar mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai anggota masyarakat. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki inisiatif dan peran aktif dalam memulai berbagai kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi kehidupannya sendiri. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan kemandirian, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kemudian menurut Rizka Humaira (2022) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, serta kreativitas secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan memberikan

ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta mengelola potensi yang dimiliki. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas proses pembangunan di lingkungannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap dan menyeluruh.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penguatan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan (Mulyana et al., 2022). Sedangkan menurut Anita (2020) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki agar mampu hidup mandiri dan menghadapi berbagai permasalahan secara mandiri. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk tidak bergantung pada pemerintah atau pihak lain, melainkan mampu mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab demi keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses

dan upaya yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta peran aktif masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk berinisiatif, berpartisipasi, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari.

Melalui pemberdayaan masyarakat, individu maupun kelompok didorong untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara mandiri. Proses ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, dengan memperkuat kesadaran akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dijelaskan Jaji (2024) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 serta Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat lokal, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial, dan peningkatan swadaya masyarakat guna

mendorong perbaikan kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat.

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Alhada et al (2021) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kapasitas masyarakat, terutama kelompok lemah yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti persepsi dan keterbatasan diri, maupun faktor eksternal berupa tekanan dari struktur sosial yang tidak adil. Melalui proses pemberdayaan, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta pada akhirnya mewujudkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Hal serupa juga diungkapkan Dewi et al (2021) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya kemandirian masyarakat. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat untuk berpikir secara rasional, mengambil keputusan yang tepat, serta memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, kemandirian mencakup kemampuan dalam berpikir, bertindak, serta mengendalikan diri secara bertanggung jawab.

Kemudian menurut Margayaningsih (2018) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan individu yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu individu yang mampu mengambil keputusan

dan memenuhi kebutuhannya tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak lain.

- 2) Menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki etos kerja positif, sehingga terbentuk kondisi kerja yang sehat, produktif, serta saling menguntungkan antaranggota masyarakat.
- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi diri dan lingkungan sekitar, agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 4) Membekali masyarakat dengan kemampuan perencanaan dan tanggung jawab, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan ekonomi.
- 5) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan bernegosiasi, agar masyarakat mampu mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungannya.
- 6) Menurunkan tingkat kemiskinan, melalui pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan dasar masyarakat sehingga tercipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perubahan yang positif. Melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, masyarakat diharapkan menjadi lebih sejahtera dan memiliki daya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan

demikian, proses pemberdayaan dapat mendorong terbentuknya kemandirian masyarakat secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada pihak lain (Efendi et al., 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses strategis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penguatan individu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat lokal, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, serta peningkatan swadaya masyarakat guna memperbaiki kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu berpikir rasional, mengambil keputusan secara mandiri, memecahkan permasalahan, serta memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal. Proses ini juga mendorong tumbuhnya etos kerja positif, kemampuan perencanaan, tanggung jawab sosial, berpikir kritis, dan keterampilan bernegosiasi. Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak lain.

c. Prinsip - Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penting untuk memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat sebagai landasan utama. Dalam (Maryani & Nainggolan (2020) dijelaskan prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dan lembaga pelaksana program pemberdayaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hubungan yang dibangun bersifat sejajar dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di antara seluruh pihak yang terlibat. Setiap individu saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tercipta proses saling belajar, saling mendukung, dan saling bertukar pengalaman. Melalui proses tersebut, individu yang terlibat dalam pemberdayaan diharapkan mampu mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, yaitu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tingkat partisipasi tersebut

diperlukan waktu serta proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Pendamping berperan memberikan arahan dan motivasi agar masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan layak.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menekankan pada penghargaan dan penguatan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat, dibandingkan dengan ketergantungan pada bantuan dari pihak luar. Masyarakat, termasuk kelompok miskin, tidak dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi dan kapasitas, meskipun terbatas. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi, kondisi lingkungan, tenaga kerja, kemauan untuk berkembang, serta norma-norma sosial yang telah lama dijalankan. Seluruh potensi tersebut perlu digali dan dijadikan modal dasar dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak luar sebaiknya diposisikan sebagai pendukung, bukan sebagai faktor yang melemahkan kemandirian masyarakat. Dalam hal ini, peran pendamping diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi diri, memecahkan

permasalahan hidup, serta memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan pada pihak lain.

4) Prinsip Keberlanjutan

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, peran pendamping memang cenderung lebih dominan, namun seiring berjalannya waktu peran tersebut harus semakin berkurang hingga akhirnya masyarakat mampu mengelola kegiatan secara mandiri. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus disusun secara sistematis dan bertahap untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat. Melalui proses tersebut, masyarakat diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan.

Kemudian menurut Irawan (2023) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah prinsip dasar yang perlu diterapkan, prinsip – prinsip tersebut meliputi:

1) Penyadaran

Penyadaran merupakan proses membangun kesadaran masyarakat agar memahami tujuan yang ingin dicapai serta permasalahan yang dihadapi. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan mampu mengenali peluang, menggali potensi, serta memanfaatkan sumber

daya yang selama ini ada namun belum dikembangkan. Kesadaran tersebut juga membantu masyarakat memahami secara lebih mendalam kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai permasalahan.

2) Pendidikan dan pelatihan

Ini berperan sebagai sarana untuk memperluas wawasan masyarakat serta membekali mereka dengan keterampilan praktis. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan bertindak secara nyata dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3) Pengorganisasian

Bertujuan memperkuat posisi masyarakat agar mampu menentukan arah dan nasibnya sendiri. Pengorganisasian diperlukan agar setiap anggota masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam upaya keluar dari permasalahan bersama.

4) Pengembangan kekuatan

Dimaknai sebagai peningkatan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi dan mengendalikan kondisi sosial di sekitarnya. Tanpa penyadaran, pelatihan, dan organisasi yang baik, masyarakat akan terus berada dalam kondisi tidak berdaya. Oleh karena itu, pengembangan kekuatan diperlukan untuk menyatukan masyarakat dalam menghadapi permasalahan.

5) Pengembangan dinamika

Menekankan bahwa masyarakat berperan sebagai pengambil keputusan sekaligus pelaksana program pemberdayaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Dalam prinsip ini, setiap perubahan yang terjadi merupakan hasil inisiatif masyarakat sendiri, dengan keputusan yang diambil dari dalam komunitas, bukan ditentukan oleh pihak luar.

Berdasarkan komparasi pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penekanan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat. Maryani & Nainggolan (2020) lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip normatif sebagai landasan konseptual pemberdayaan, seperti kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan, yang berfungsi sebagai pedoman etis dalam pelaksanaan program. Sementara itu, Irawan (2023) lebih menekankan pada aspek proses dan tahapan pemberdayaan, yang meliputi penyadaran, pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, serta pengembangan dinamika masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dalam setiap perubahan yang terjadi.

Meskipun memiliki perbedaan fokus, kedua pandangan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Keduanya menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, penguatan potensi dan kapasitas internal, serta pengurangan

ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, prinsip dan proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan.

d. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Person 1994 dalam Patilaiya et al., (2022) terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur keberdayaan. Pertama, dipahami sebagai proses pembangunan yang dimulai dari pertumbuhan individu dan berlanjut ke perubahan berskala lebih besar dalam masyarakat. Kedua, merupakan kondisi psikologis yang ditandai oleh kesadaran diri, keyakinan akan nilai diri sendiri, dan kemampuan untuk membantu orang lain. Ketiga, terkait dengan proses pembangunan sosial, yang dimulai dengan pendidikan dan politisi bagi kelompok yang lebih luas, serta kebutuhan akan tindakan kolektif untuk mengatasi masalah dan memperbaiki struktur.

Ketiga dimensi indikator tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang kompleks yang melibatkan aspek individu, psikologis, dan sosial. Penguatan pada tingkat individu merupakan landasan utama yang harus dikembangkan terlebih dahulu, karena masyarakat akan sulit berperan aktif dalam perubahan yang lebih luas. Selain itu, faktor-faktor psikologis seperti kesadaran diri dan kepercayaan diri dapat menjadi faktor penting dalam kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan

produktif. Lebih lanjut, pendidikan yang ideal tidak hanya harus berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada pengelolaan kolektif yang dapat memaksimalkan manfaat sekaligus memfasilitasi pengembangan struktur sosial yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Model

Kata model berasal dari bahasa latin *mold* yang berarti cetakan atau *pattern* yang bermakna pola. Model merupakan suatu bentuk konstruksi yang dapat berupa konsep atau rancangan yang digunakan untuk menggambarkan secara utuh suatu pemikiran maupun bentuk fisik suatu benda, biasanya disajikan dalam ukuran atau skala yang lebih kecil dari bentuk aslinya (Harahap & Isya, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut R. L. Siregar (2021) istilah model dapat dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan suatu aktivitas.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa model merupakan suatu pola, rancangan, atau kerangka konseptual yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai acuan dalam memahami, menjelaskan, serta melaksanakan suatu aktivitas atau fenomena tertentu. Model berfungsi sebagai representasi dari kondisi atau proses yang sebenarnya, baik dalam bentuk konsep maupun visual, sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap suatu pemikiran, perencanaan, maupun praktik yang akan dijalankan.

b. Model – model Pemberdayaan Masyarakat

Dijelaskan oleh Aziz Muslim 2007 dalam Susilo (2016) pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di Indonesia dikenal tiga bentuk model program pemberdayaan masyarakat. Pertama, model pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini memprioritaskan peningkatan pendapatan nasional melalui kenaikan GNP tahunan hingga mencapai sekitar 7% atau lebih. Orientasi pembangunan difokuskan pada sektor produksi, sedangkan penanganan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial ditempatkan sebagai prioritas lanjutan. Pengurangan masalah sosial tersebut umumnya diharapkan terjadi melalui mekanisme *trickle-down effect*.

Kedua, model pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan ini menempatkan kelompok masyarakat miskin sebagai sasaran utama dan memandang kemiskinan sebagai akibat dari terpinggirkannya masyarakat dalam proses pembangunan. Model ini menekankan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti kesempatan memperoleh pendapatan serta akses terhadap layanan publik, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, penerangan, dan fasilitas lainnya. Munculnya model ini dilatarbelakangi oleh kondisi sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki aset produktif selain tenaga fisik, kemauan bekerja, dan kemampuan intelektual dasar. Selain itu, keterbatasan pendapatan yang tidak mampu

menjangkau kebutuhan hidup serta lambatnya peningkatan taraf hidup kelompok termiskin menyebabkan mereka sering kali belum dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

Ketiga, model pembangunan yang berorientasi pada manusia. Model ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, atau terpenuhinya kebutuhan dasar semata. Lebih dari itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendorong terciptanya produktivitas yang bernilai tinggi.

Berbeda dengan yang telah diuraikan di atas, Sulistiyani (2004) menjelaskan mengenai model kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat, menurutnya kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dibangun atas dasar kesepakatan, kesamaan tujuan, dan saling membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas serta mencapai hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat terwujud apabila melibatkan lebih dari satu pihak, memiliki visi yang sama, didasarkan pada kesepakatan bersama, dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Keberhasilan kemitraan memerlukan komitmen yang seimbang dari setiap pihak agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal. Lebih lanjut model pemberdayaan kemitraan dibagi menjadi tiga model.

Pertama kemitraan semu kemitraan semu adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang tampak saling bermitra, tetapi hubungan yang terjalin belum berjalan secara seimbang. Dalam kondisi ini, para pihak merasa perlu bekerja sama, namun belum sepenuhnya memahami tujuan, manfaat, maupun peran masing-masing dalam kemitraan tersebut.

Kedua kemitraan mutualistik merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesadaran untuk saling memperoleh manfaat. Dalam hubungan ini, setiap pihak memperoleh manfaat dari kerja sama yang dilakukan sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan. Kemitraan dapat berlangsung antara individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki sumber daya dan kemampuan berbeda, namun saling melengkapi dalam melakukan kerja sama. Dengan adanya pertukaran manfaat, pengetahuan, pengalaman, maupun sumber daya, masing-masing pihak dapat lebih mudah mencapai tujuan yang diharapkan serta meningkatkan efektivitas pada pelaksanaan kegiatan bersama.

Ketiga kemitraan konjugasi merupakan bentuk kerja sama yang dianalogikan dari proses konjugasi pada paramecium, yaitu ketika dua organisme saling berinteraksi untuk memperoleh energi dan memperkuat kemampuannya sebelum kembali berkembang secara mandiri. Dalam konteks organisasi, kelompok, maupun individu, model kemitraan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterbatasan

tertentu untuk saling membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian penjelasan lain dalam memahami konsep manajemen kegiatan pemberdayaan masyarakat, Jack Rothman dalam Harapan (2020) mengemukakan tiga model yakni:

1) Pemberdayaan masyarakat lokal (*locality development*).

Model ini merupakan upaya untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi melalui keterlibatan aktif serta prakarsa yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa di dalam masyarakat terdapat potensi tersembunyi yang belum tergali dan perlu dikembangkan secara optimal.

2) Perencanaan sosial.

Model ini diarahkan pada upaya pemecahan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Isu-isu yang menjadi perhatian meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan permasalahan sosial lainnya.

3) Aksi sosial.

Pendekatan ini menargetkan terjadinya perubahan mendasar pada struktur organisasi, lembaga, maupun tatanan sosial masyarakat melalui proses redistribusi kekuasaan, sumber daya, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan. Model ini berpijak pada pandangan bahwa masyarakat sering kali berada dalam posisi yang

dirugikan akibat ketidakadilan struktur sosial. Oleh karena itu, aksi sosial berorientasi pada proses sekaligus hasil, dengan cara mengorganisasi masyarakat melalui peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan tindakan nyata guna mengubah struktur kekuasaan agar lebih mencerminkan nilai demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Selain itu Harapan (2020) dari prespektif Islam juga berupaya merumuskan secara singkat beberapa bentuk model manajemen pengembangan masyarakat. Model-model tersebut meliputi beberapa bidang berikut:

1) Model pengembangan pada sektor pendidikan.

Melalui pendidikan, perubahan pola pikir masyarakat dapat dilakukan secara bertahap, sekaligus mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat dengan dukungan proses manajerial yang terencana dan efektif.

2) Model pengembangan pada bidang kesehatan dan lingkungan.

Aspek kesehatan dipandang sebagai elemen fundamental dalam pengembangan masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat akan memudahkan individu untuk melakukan pemberdayaan diri, yang selanjutnya diperkuat melalui peran pendamping atau *community worker*.

3) Model pengembangan pada sektor ekonomi.

Fokus utama yang banyak dilakukan oleh *community worker* adalah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini juga dilaksanakan dalam lingkup organisasi kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai sarana penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Lebih spesifik dan rinci lagi dijelaskan menurut Pakpahan et al (2021) beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan dalam praktik pemberdayaan masyarakat:

1) Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development Model*)

Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (MPBM) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam menetapkan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Adapun beberapa prinsip pokok dalam Model Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berperan secara aktif dalam setiap proses pembangunan, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Keterlibatan tersebut mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap hasil pembangunan.

b) Pemberdayaan Masyarakat

MPBM diarahkan untuk memperkuat kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

c) Keterbukaan dan Transparansi

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

d) Keadilan dan Kesenjangan

MPBM menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya serta hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.

e) Kerja Sama Antar Pihak

Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

f) Kepemilikan Lokal

Pengembangan sumber daya serta pembangunan sarana dan prasarana harus berlandaskan kebutuhan, aspirasi, serta nilai-nilai lokal, dengan tetap menghargai kearifan masyarakat setempat.

g) Peningkatan Mutu Hidup

Tujuan utama MPBM adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

2) Model Pendidikan Partisipatif (*Participatory Education Model*)

Model pendidikan partisipatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran. Pendekatan ini mengubah peran guru yang semula sebagai sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator, serta mengakui bahwa siswa memiliki pengalaman, pengetahuan, dan karakteristik masing-masing yang dapat mendukung proses belajar. Adapun beberapa

karakteristik utama dari model pendidikan partisipatif adalah sebagai berikut:

a) Keterlibatan Siswa

Peserta didik didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui berbagai aktivitas, seperti diskusi, kerja proyek, simulasi peran, maupun kegiatan lain yang memungkinkan mereka berkontribusi secara langsung.

b) Kolaborasi

Model ini menekankan pentingnya kerja sama antarsiswa, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kegiatan kelas secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama.

c) Pembelajaran Berpusat pada Siswa

Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Guru berupaya merancang pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan menarik bagi peserta didik.

d) Pengalaman Praktis

Siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, seperti kegiatan lapangan, eksperimen, maupun proyek-proyek praktis lainnya.

e) Pengembangan Keterampilan Metakognitif

Peserta didik diajak untuk memahami dan merefleksikan cara mereka belajar, serta mengevaluasi strategi belajar yang paling efektif bagi diri mereka sendiri.

f) Pembelajaran Berbasis Masalah

Siswa dihadapkan pada permasalahan nyata atau tugas berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga pembelajaran dapat dikaitkan dengan konteks dunia nyata.

3) Model Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment Model*)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pembentukan koperasi dan jaringan usaha. Model pemberdayaan ekonomi merupakan suatu pendekatan atau strategi yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi individu, kelompok, maupun komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki pada tingkat individu atau kelompok agar mereka mampu mengendalikan dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara mandiri. Berikut beberapa model pemberdayaan ekonomi yang umum diterapkan:

a) Model Pendidikan dan Pelatihan

Model ini menitikberatkan pada pemberian pendidikan dan pelatihan kepada individu atau kelompok agar mereka memiliki keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha secara mandiri.

b) Model Pembiayaan

Model ini berfokus pada penyediaan dukungan keuangan, seperti pinjaman usaha, modal ventura, maupun bantuan dana lainnya bagi individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan kegiatan usahanya.

c) Model Infrastruktur dan Akses

Pendekatan ini menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik serta peningkatan aksesibilitas, seperti jalan, listrik, air bersih, dan teknologi informasi, guna menunjang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

d) Model Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Model ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah melalui penyediaan akses terhadap pelatihan, pasar, serta berbagai sumber daya pendukung lainnya.

e) Model Kemitraan Publik-Swasta

Model ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan program dan proyek ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

f) Model Pengembangan Berbasis Komunitas

Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan

ekonomi dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal.

g) Model Pengembangan Keterampilan dan Jaringan

Model ini berfokus pada peningkatan keterampilan sosial serta perluasan jaringan sosial individu atau kelompok agar mereka mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia.

h) Model Pemberdayaan Perempuan

Model ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi serta berupaya meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan ekonomi.

Pada model pemberdayaan ekonomi ini, setiap model pemberdayaan ekonomi memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Maka dari itu penerapan kombinasi dari beberapa model sering kali diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, perancangan dan pelaksanaan model pemberdayaan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi lokal serta karakteristik masyarakat setempat.

4) Model Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment Model*)

Model pemberdayaan politik merupakan suatu kerangka konseptual atau pendekatan yang digunakan untuk memahami serta menganalisis keterlibatan individu dan kelompok dalam kehidupan politik. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana masyarakat

memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam sistem politik. Beberapa model pemberdayaan politik yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

a) Model Pendidikan dan Pelatihan

Model ini menekankan peran pendidikan dan pelatihan sebagai sarana utama dalam meningkatkan kapasitas politik individu. Pendidikan politik memberikan pemahaman mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam berbagai proses politik.

b) Model Partisipasi dan Organisasi

Pendekatan ini menyoroti pentingnya organisasi politik dan sosial sebagai wadah pemberdayaan individu dan kelompok. Melalui organisasi tersebut, masyarakat dapat bekerja secara kolektif, mengorganisasi dukungan, serta memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

c) Model Penyuluhan dan Advokasi

Model ini menekankan kegiatan penyuluhan dan advokasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan politik masyarakat. Penyuluhan politik memberikan informasi mengenai hak serta peluang partisipasi politik, sedangkan advokasi membantu individu dan kelompok dalam menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih efektif.

d) Model Partisipasi Elektronik dan Teknologi Informasi

Model ini mencerminkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi politik, meningkatkan interaksi publik, serta menggalang dukungan terhadap berbagai isu politik.

e) Model Pemberdayaan Komunitas

Pendekatan ini berfokus pada penguatan komunitas lokal dengan membangun kapasitas kolektif masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam proses politik serta memperjuangkan kepentingan bersama secara berkelanjutan.

5) Model Pemberdayaan Sosial (*Social Empowerment Model*)

Model pemberdayaan sosial merupakan suatu pendekatan atau strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antara individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah dalam mewujudkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Beberapa prinsip utama yang mendasari model pemberdayaan sosial antara lain sebagai berikut:

a) Partisipasi

Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada

kehidupan mereka. Partisipasi mencakup peningkatan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai program atau kebijakan.

b) Kolaborasi

Kolaborasi mendorong terjalinnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti individu, kelompok masyarakat, organisasi non-profit, sektor swasta, dan pemerintah, guna mencapai tujuan bersama. Kerja sama yang efektif memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal serta memperluas jaringan dukungan dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks.

c) Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta penyediaan berbagai sumber daya pendukung lainnya.

d) Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan menekankan pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk menjadi

pelaku utama perubahan sosial, bukan sekadar penerima manfaat dari program atau kebijakan eksternal.

e) Advokasi

Advokasi diarahkan pada upaya mendorong perubahan terhadap kebijakan atau praktik yang dinilai tidak adil atau merugikan kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan advokasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, kampanye, maupun pendekatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran publik serta memengaruhi kebijakan.

Model pemberdayaan sosial banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan masyarakat, kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, serta advokasi hak asasi manusia. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

6) Model Pemberdayaan Teknologi (*Technological Empowerment Model*)

Model Pemberdayaan Teknologi merujuk pada suatu pendekatan atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau organisasi melalui pemanfaatan teknologi. Model ini mencakup serangkaian tahapan dan komponen yang saling berkaitan guna memastikan teknologi dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa komponen yang

umumnya terdapat dalam model pemberdayaan teknologi antara lain sebagai berikut:

a) Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini berfokus pada proses identifikasi kebutuhan serta permasalahan yang ingin diatasi melalui pemanfaatan teknologi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, maupun kajian lainnya untuk memahami tantangan dan potensi yang dimiliki.

b) Pemilihan Teknologi

Setelah kebutuhan dan permasalahan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis teknologi yang paling sesuai. Pemilihan ini dapat mencakup perangkat keras, perangkat lunak, maupun platform teknologi yang relevan dengan tujuan pemberdayaan.

c) Pelatihan dan Penguatan Kapasitas

Masyarakat atau organisasi pengguna teknologi perlu dibekali dengan pelatihan agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Pelatihan tersebut dapat meliputi penggunaan aplikasi, pengelolaan data, keamanan informasi, serta keterampilan teknis lainnya.

d) Penerapan Teknologi

Pada tahap ini, teknologi yang telah dipilih dan dipelajari diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau

meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan dapat berupa pengembangan aplikasi, integrasi sistem, maupun penggunaan solusi berbasis cloud.

e) Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemberdayaan teknologi perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan ini meliputi penilaian kinerja, pengumpulan umpan balik dari pengguna, serta penyesuaian strategi apabila diperlukan.

f) Dukungan dan Pemeliharaan

Agar teknologi dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang, diperlukan dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penanganan masalah teknis, pembaruan sistem atau perangkat lunak, serta pengelolaan risiko keamanan.

7) Model Pemberdayaan Lingkungan (*Environmental Empowerment Model*)

Model pemberdayaan lingkungan merupakan suatu pendekatan atau strategi yang dirancang untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun

pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Adapun beberapa unsur yang umumnya terdapat dalam model pemberdayaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

a) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana.

b) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi tersebut mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan maupun tindakan nyata di lapangan.

c) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan lingkungan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bentuk kegiatan ini dapat berupa pengembangan usaha ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, atau pengelolaan limbah.

d) Pembangunan Kapasitas

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

e) Kemitraan dan Jaringan

Model ini menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat lokal, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kemitraan dan jaringan tersebut berperan dalam mendukung pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, serta penyediaan dukungan teknis dalam upaya pemberdayaan lingkungan.

Berbagai model pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami konsep, tujuan, dan strategi pemberdayaan. Setiap model lahir dari latar belakang paradigma, konteks sosial, serta fokus permasalahan yang berbeda, sehingga memiliki penekanan dan karakteristik masing-masing. Aziz Muslim 2007 dalam Susilo (2016) lebih menekankan orientasi dan arah pembangunan makro, terutama dalam melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjelaskan dinamika kebijakan pembangunan nasional, namun relatif kurang menekankan peran aktif masyarakat pada tahap awal model pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Sulistiyani (2004) menegaskan bahwa model pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan merupakan bentuk kerja

sama antara dua pihak atau lebih yang dibangun atas dasar kesepakatan, kesamaan tujuan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kapasitas serta mencapai tujuan bersama. Menurutnya, model kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas tiga bentuk, yaitu kemitraan semu, kemitraan mutualistik, dan kemitraan konjugasi.

Berbeda dengan itu, model Jack Rothman dalam Harapan (2020) secara tegas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan sosial, baik melalui pengembangan lokal, perencanaan sosial, maupun aksi sosial. Pendekatan Jack Rothman dalam Harapan (2020) lebih menonjolkan dimensi partisipasi, kesadaran kritis, dan redistribusi kekuasaan, sehingga relevan untuk konteks pemberdayaan berbasis keadilan sosial. Kemudian model pemberdayaan perspektif Islam yang dikemukakan Harapan memiliki kesamaan dengan model pembangunan berorientasi manusia. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan perubahan struktural dan ekonomi, tetapi juga transformasi pola pikir, sikap, dan moral masyarakat, sehingga bersifat holistik.

Sementara itu, Pakpahan et al (2021) mengembangkan model pemberdayaan yang paling komprehensif dan teknis. Dibandingkan teori-teori sebelumnya yang bersifat konseptual, pendekatan ini menawarkan kerangka praktis yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan. Model pemberdayaan ekonomi, sosial, politik, teknologi,

dan lingkungan dalam kerangka ini saling melengkapi dan menegaskan bahwa pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang bersifat komprehensif, bertahap, dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan perubahan. Pemberdayaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas manusia, partisipasi sosial, kesadaran politik, pemanfaatan teknologi, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Secara umum, perbedaan antar model terletak pada titik tekan pendekatan yang digunakan, baik yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan manusia, perubahan struktur sosial, maupun penguatan sektor-sektor spesifik seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Namun demikian, seluruh model memiliki kesamaan mendasar dalam memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya serta menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keberhasilan suatu pemberdayaan sangat bergantung pada kemampuan mengombinasikan model-model yang relevan secara

kontekstual, sehingga mampu menciptakan perubahan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Ekonomi Kewarganegaraan (*Ekonomi Civic*)

a. Pengertian Ekonomi Kewarganegaraan (*Ekonomi Civic*)

Economy civic atau ekonomi kewarganegaraan merupakan dua konsep yang saling berkaitan, yaitu konsep ekonomi dan konsep kewarganegaraan. Konsep ekonomi dipahami sebagai berbagai aktivitas manusia yang mencakup proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Sementara itu, konsep *civic* berkaitan dengan ilmu kewarganegaraan yang mempelajari hubungan antarsesama warga negara serta hubungan antara warga negara dengan negara. *Economy civic* sebagai suatu bidang keilmuan bersifat dinamis karena perkembangannya senantiasa menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan yang muncul dalam bidang ekonomi, lingkungan, serta dinamika kehidupan masyarakat dan dunia secara luas (Sembiring et al., 2025).

Lebih lanjut dijelaskan (Rubei, 2014, hlm. 60) dalam Agil Nanggala & Karim Suryadi (2020) *Economic civic* atau ekonomi kewarganegaraan merupakan suatu kajian sekaligus praktik yang menitikberatkan pada pengenalan konsep serta prinsip-prinsip ekonomi kepada warga negara. Pendekatan ini digunakan sebagai strategi dan upaya untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat agar mampu menjadi warga negara atau komunitas yang mandiri dan berdaya.

Economic civic atau ekonomi kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bidang yang bersifat dinamis, *ekonomi civic* berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, lingkungan, dan dinamika sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari peran kewarganegaraannya. Dengan demikian, *ekonomi civic* berfungsi sebagai strategi pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi hingga membangun kemandirian, serta menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat mampu menjadi warga negara yang berdaya, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

b. Nilai-nilai pada Ekonomi Kewarganegaraan (*Ekonomi Civic*)

Nilai-nilai dalam *ekonomi civic* merupakan fondasi moral yang memandu individu untuk bertindak tidak hanya demi keuntungan pribadi, tetapi sebagai kontribusi terhadap tatanan sosial. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang diidentifikasi dari berbagai riset:

1) Tanggung jawab sosial

Ditegaskan dalam Sutantina et al., (2025) bahwa ekonomi kewarganegaraan mengembangkan karakter ekonomi warga negara yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kepedulian

terhadap lingkungan sosial. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai kewarganegaraan akan melahirkan perilaku ekonomi yang adil dan beretika. Dengan demikian tanggung jawab sosial merupakan nilai fundamental dalam *ekonomi civic* yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi warga negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. *Ekonomi civic* tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari dimensi etika dan sosial, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan dalam praktik kewarganegaraan.

2) Kerja sama dan partisipasi ekonomi

Economic civic bertujuan membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi melalui kerja sama dan kewirausahaan berbasis nilai kewarganegaraan. Jurnal ini menegaskan bahwa kerja sama ekonomi merupakan bagian dari kompetensi kewarganegaraan (Hariyanti & Filma Alia, 2022). Sehingga dapat dipahami bahwa *ekonomi civic* menekankan pentingnya kerja sama. Kerja sama ini dapat tercermin seperti adanya partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan ekonomi. Warga negara dipandang bukan hanya sebagai konsumen atau produsen, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang demokratis dan partisipatif. Kerja sama ekonomi dipahami sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

3) Kebermanfaatan dan Kesejahteraan bersama

Dalam Hariyanti & Filma Alia (2022) bahwa ekonomi civic dikembangkan untuk membekali warga negara dengan pemahaman dan keterampilan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan berbasis ekonomi dipandang sebagai sarana membangun kesadaran bahwa kegiatan ekonomi memiliki tujuan sosial yang lebih luas yang didorong melalui kerja sama oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan produksi. Hal ini berarti kebermanfaatan menempatkan tujuan akhir *economic civic* pada tercapainya kesejahteraan bersama. Dalam kajian ekonomi kewarganegaraan, aktivitas ekonomi warga negara diarahkan untuk menciptakan manfaat sosial, memperkuat solidaritas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam *ekonomi civic*. Namun, kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya aspek ekonomi, melainkan juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Kesejahteraan keluarga dipandang penting karena menjadi pondasi bagi kesehatan mental individu. Selain itu, konsep *well-being* berkaitan dengan *subjective well-being*, *psychological well-being*, kualitas hidup, kepuasan hidup, dan kebahagiaan. Menurut Proulx dan Snyder-Rivas (2013), individu yang merasakan kebahagiaan cenderung memiliki kondisi

kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, Dodge, Daly, Sanders, dan Lalage (2012) serta Shek, Sun, dan Ma (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan ditandai dengan tingginya kepuasan hidup dan dominannya emosi positif. Sementara itu, Lamb (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan juga tercermin dari kemampuan individu menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal, hal ini dijelaskan dalam (K. S. Dewi & Ginanjar, 2019).

Dengan demikian, kebermanfaatan dan kesejahteraan bersama dalam perspektif *ekonomi civic* di sini dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ekonomi ditunjukkan melalui meningkatnya pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kesejahteraan sosial ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas hidup, rasa aman dan tenang, kepuasan hidup, hubungan sosial yang baik, serta kondisi psikologis yang positif sebagai dampak dari aktivitas ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan analisis ringkas dan kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel, objek, metode, atau permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul / Nama Peneliti / Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian	Persamaan Dengan Penelitian
1.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Desa Fashion di Desa Kali Tengah (Katiah et al., 2019)	Desa Kalitengah memiliki potensi lokal berupa keteampilan membuat masyarakat untuk dikembangkan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena masih terbatasnya pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan, penguatan kompetensi, pemanfaatan teknologi pemasaran, serta dukungan pemerintah agar potensi lokal batik dapat meningkatkan kesejahteraan	Pada pemberdayaan ini menggunakan studi kasus dan tidak ada kaitannya dengan nilai <i>ekonomi civic</i>	Sama sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui potensi lokal berbasis keterampilan.

		masyarakat dan mendorong kemandirian desa.		
2.	Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Ukm Pembuat Kopi Muria) (Syadzali, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, model pemberdayaan berbasis kemandirian pangan yang diterapkan di Kampung Mafta efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan satu kuncinya adalah melalui potensi yang telah dimiliki. Selain itu ketersediaan modal dalam usaha juga merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang proses produksi.	Lebih membahasa mengenai perkembangan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal, dan sama sekali tidak membahas mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis <i>ekonomi civic</i>	Sama sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pada UMKM
3.	Pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup di desa margalaksana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat	Pada pemberdayaan ini tidak ada yang dikaitkan dengan nilai	Sama sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan

	kabupaten bandung barat (Subekti et al., 2018)	berbasis lingkungan hidup di Desa Margalaksana dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal, seperti budidaya ikan melalui kolam jaring apung, kerajinan batik, pengolahan limbah eceng gondok, dan pengembangan wisata. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya. Program ini didukung oleh kerja sama antara kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait Meskipun masih menghadapi kendala namun pemberdayaan yang dilakukan telah menunjukkan	nilai <i>ekonomi civic</i>	memanfaatkan kerja sama antar kelompok
--	---	---	-----------------------------------	---

		hasil positif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lingkungan yang dimiliki desa.		
4.	Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal Dalam Mendorong Perekonomian Di Desa Girikerto Sleman (Suyanto & Suryani, 2022)	Desa Girikerto memiliki potensi lokal yang beragam, meliputi pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, kuliner dan pangan olahan, kerajinan batik, serta pariwisata yang dikembangkan melalui kegiatan UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi tersebut didukung oleh inovasi, kreativitas, teknologi, serta pembinaan dan pendampingan dari	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai ekonomi civic dan tidak ada kaitannya dengan nilai <i>ekonomi civic</i> .	Sama sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM

		pemerintah desa, BUMDes, akademisi, dan berbagai lembaga terkait, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya manusia, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi agar pemanfaatan potensi lokal dapat berjalan lebih optimal.		
5.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan UMKM Manisan Kelapa Gula Aren di Desa Tetebatu Selatan , Sikur , Lombok Timur (Rizqi et al., 2025)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM Manisan Kelapa Gula Aren di Desa Tetebatu Selatan berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam produksi, inovasi produk, dan pengelolaan	Penelitian ini lebih kepada pelatihan bukan analisis model dan tidak membahas <i>ekonomi civic</i>	Sama sma membahas pemberdayaan masyarakat dalam konteks UMKM

		usaha melalui pelatihan partisipatif berbasis <i>learning by doing</i>. Pemanfaatan potensi lokal berupa kelapa dan gula aren mampu dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dapat berjalan efektif ketika adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang berperan sebagai aktor utama dalam kegiatan usaha produktif sehingga memperoleh manfaat ekonomi dari keterlibatan tersebut. Program ini juga didukung oleh sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan pelaku usaha yang membentuk model pemberdayaan berbasis potensi lokal		
--	--	--	--	--

		yang berkelanjutan.		
--	--	------------------------	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penelitian diatas yang dilakukan oleh Katiah et al.,(2019) menunjukkan bahwa pengembangan potensi lokal melalui keterampilan membatic dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat apabila didukung oleh penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa berbagai potensi lokal, seperti pengolahan kopi, pemanfaatan sumber daya lingkungan, serta pengembangan UMKM berbasis produk lokal, mampu menjadi sumber kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program pemberdayaan umumnya didukung oleh adanya pelatihan, pendampingan, penguatan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta kerja sama antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Selain meningkatkan kemampuan ekonomi, program-program tersebut juga mendorong tumbuhnya inovasi usaha, partisipasi sosial, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, masih terdapat kesenjangan penelitian. Sebagian besar

penelitian lebih berfokus pada pemanfaatan potensi lokal, pengembangan UMKM, peningkatan pendapatan, dan penguatan kapasitas masyarakat, namun belum secara khusus mengkaji model pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan nilai-nilai *ekonomi civic*. Padahal, nilai-nilai *ekonomi civic* seperti tanggung jawab sosial, kerjasama dan partisipasi ekonomi, kebermanfaatan dan kesejahteraan bersama merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dan urgensi penelitian ini untuk menganalisis dan merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *ekonomi civic* dalam proses pemberdayaan masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai proses sosial yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial yang terangkum dalam konsep *ekonomi civic*.

Penelitian ini berangkat dari model pemberdayaan yang di terapkan oleh UMKM Sumber Rejeki yang dinilai unik untuk di teliti. Penelitian ini diawali dengan melihat kondisi awal masyarakat Desa Kasreman, Kabupaten Ngawi, khususnya pada UMKM Sumber Rejeki. Kemudian model pemberdayaan masyarakat yang di terapkan melalui pembuatan tas anyaman plastik. Model

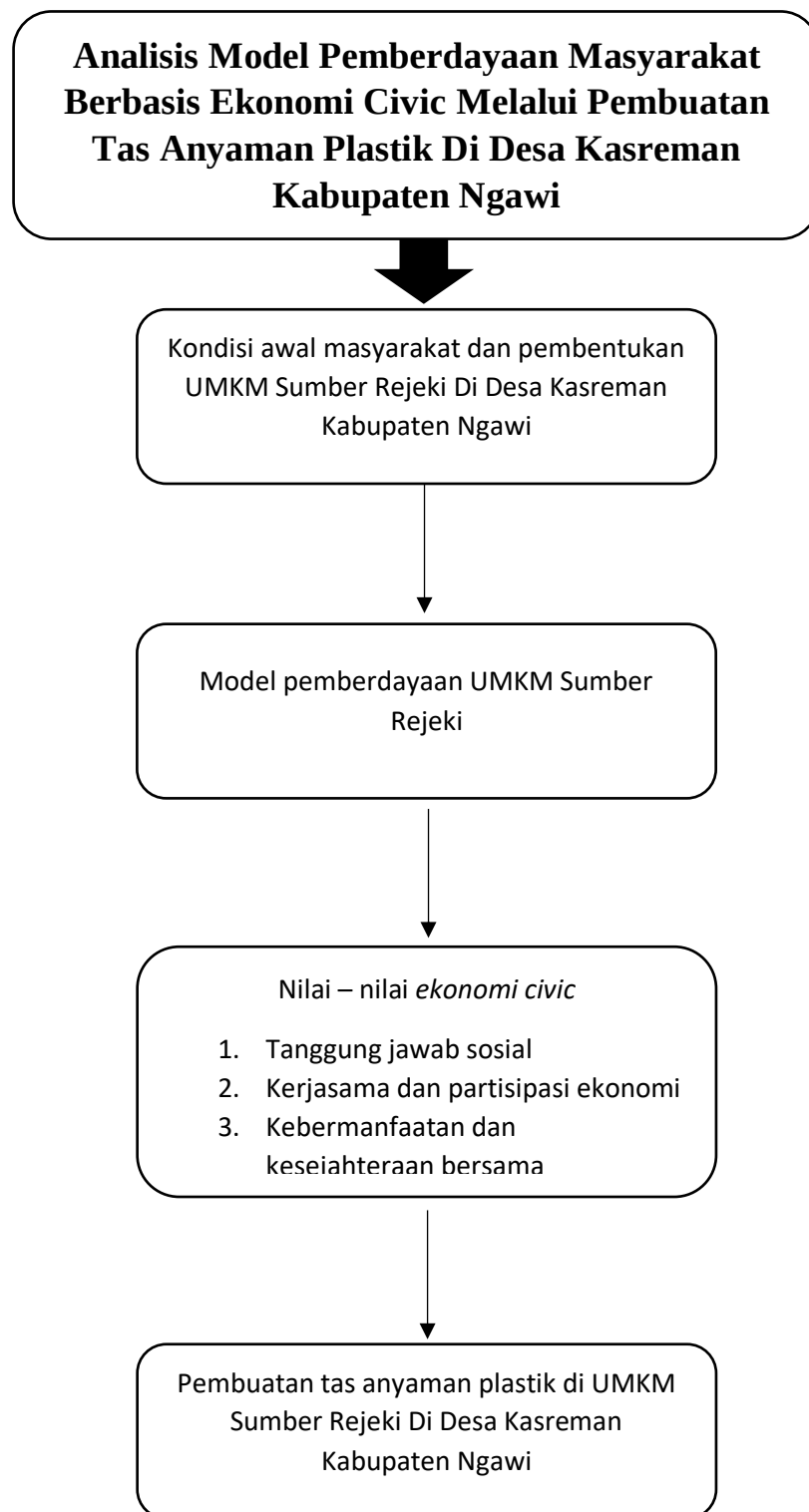
pemberdayaan ini tidak semata-mata berfokus pada produksi barang, melainkan pada proses pemberdayaan itu sendiri.

Model pemberdayaan yang diterapkan kemudian diarahkan untuk membangun *ekonomi civic*. *Ekonomi civic* dalam penelitian ini dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kewargaan, seperti gotong royong, kerja sama, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi. Melalui kegiatan produksi tas anyaman plastik, masyarakat belajar bekerja secara bersama-sama, saling membantu, dan membangun solidaritas sosial. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat secara individual, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran ekonomi kolektif dalam masyarakat.

Dalam kerangka berpikir ini, tas anyaman plastik diposisikan sebagai media pemberdayaan, bukan sebagai tujuan akhir. Tas anyaman plastik berfungsi sebagai sarana untuk melatih keterampilan masyarakat, membangun kerja kolektif, serta menjadi media pembelajaran ekonomi bagi anggota masyarakat. Fokus utama penelitian tidak terletak pada kualitas atau kuantitas hasil produksi tas, melainkan pada bagaimana proses pembuatan tas tersebut mampu menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi awal masyarakat mendorong diterapkannya model pemberdayaan masyarakat yang berbasis *ekonomi civic*, dengan tas anyaman plastik sebagai media pemberdayaan. Melalui proses tersebut, diharapkan model pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi konseptual

dan praktis bagi komunitas, kelompok masyarakat, maupun daerah lain dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang sejenis. Lebih lanjut, model pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* yang dikaji dalam penelitian ini bersifat adaptif dan kontekstual, sehingga dapat diterapkan pada objek pemberdayaan yang berbeda, sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan tidak harus selalu berbasis pada pembuatan tas anyaman plastik, melainkan dapat menggunakan media atau objek lain yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir